



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu komponen perangkat daerah berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja di bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Dokumen LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang pada akhirnya dapat dijadikan acuan untuk mengetahui capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.
2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pengukuran pencapaian *output* sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 1 Januari s.d 31 Desember 2025. Dengan demikian akan terlihat seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Tahun 2025.

Semoga upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran pejabat, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik dapat menjawab tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen LKjIP ini dapat bermanfaat dan berguna sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bengkalis, 26 Januari 2026

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis**



Drs. H. Suwanto, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19690909 198908 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A...Latar Belakang.....	4
B...Maksud dan Tujuan.....	5
C...Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	6
D...Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	15
E...Struktur Organisasi.....	18
F...Sistematika Penyajian.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
2.1. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja.....	21
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.....	21
2.3. Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.....	24
2.5. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	25
2.6. Perjanjian Kinerja.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A...Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	36
BAB IV PENUTUP.....	60

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai instrumen akuntabilitas kinerja kepada Bupati Bengkalis dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada dokumen perencanaan strategis daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dengan demikian, capaian kinerja yang dilaporkan mencerminkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mengemban peran strategis dalam mendukung terwujudnya stabilitas politik, ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, serta ketentraman dan ketertiban umum sebagai prasyarat utama pembangunan daerah. Fokus kinerja diarahkan pada penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan, peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat, fasilitasi kelembagaan politik dan kemasyarakatan, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas daerah.

Secara umum, capaian kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator kinerja berada pada kategori tercapai hingga sesuai target. Capaian tersebut didukung oleh sinergi lintas perangkat daerah, koordinasi dengan instansi vertikal, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan, terutama yang dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik, keterbatasan sumber daya, serta tantangan geografis wilayah.

Dari aspek pengelolaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 telah menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat antara alokasi anggaran dan pencapaian kinerja (value for

money). Anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek perencanaan berbasis risiko dan pengukuran dampak (outcome).

LKjIP ini juga mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, antara lain meningkatnya kompleksitas isu ideologi, politik, dan sosial kemasyarakatan, serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur. Atas dasar tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Melalui penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam merealisasikan tujuan dan sasaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 19.218.002.520,00 anggaran berdasarkan DPA murni tahun 2025, terjadi perubahan berdasarkan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.20.387.578.855,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.405.674.796,00 atau 90,28%. Penjelasan realisasi penggunaan anggaran dimaksud sesuai rincian sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pagu setelah APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp.8.545.781.933,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.060.105.180,00 atau 82,62%.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, pagu setelah APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp.3.361.759.614,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.287.636.878,00 atau 97,80%.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, pagu setelah APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp.5.538.457.788,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.531.570.554,00 atau 99,88%.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, pagu setelah APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp.400.894.963,00 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp.335.783.000,00 atau 83,76%.

5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, pagu setelah APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp.400.894.963,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.335.783.000,00 atau 83,76%.
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pagu setelah APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp.258.295.761,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.175.520.494,00 atau 67,95%.
7. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, pagu setelah APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp.2.282.388.796,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.015.058.690,00 atau 88,29%.

Dalam laporan ini akan dijabarkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan perbandingan antara realisasi pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) tahun 2025 dengan target yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap Organisasi Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja OPD. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap OPD untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban OPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Menyajikan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran.
2. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tetap harus di tampilkan dan dilaporkan untuk dapat digunakan sebagai: 1) Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja OPD dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja; 2) Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3) Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun berikutnya.

C. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

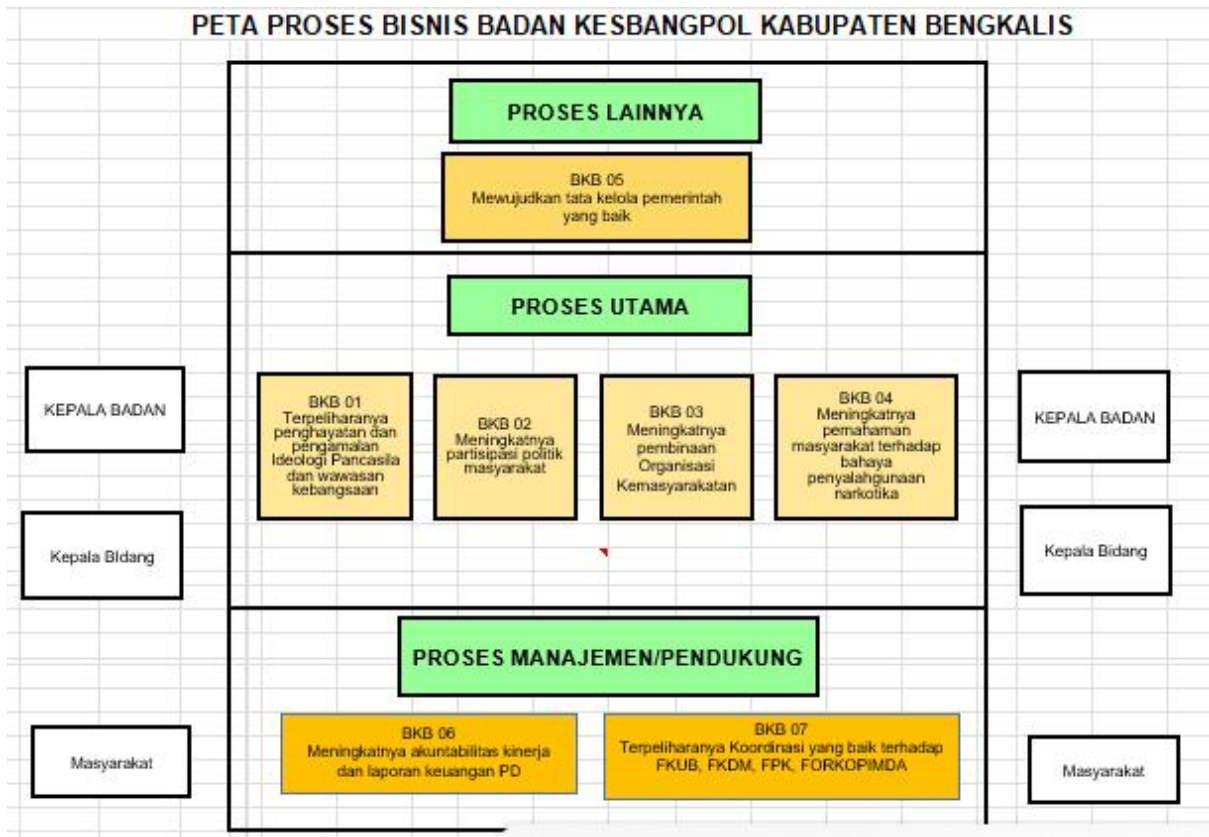
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkalis.

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

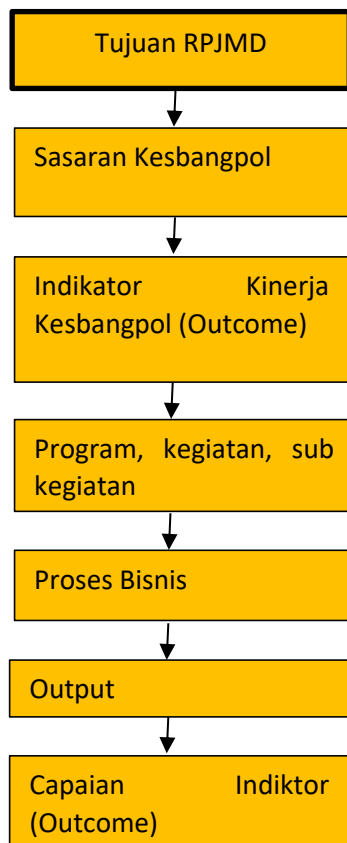
Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkalis dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS																	
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Integritas, Oramis, dan Masyarakat Berkeadilan dengan Penguatan Nilai Agama dan Budaya Melayu		Tujuan KDH													
		IK : Indeks Reformasi Birokrasi		Indikator tujuan KDH													
		Terciptanya kerukunan umat beragama		Sebaran KDH													
		Persentase penyelesaian konflik SARA		Indikator sebaran KDH													
		Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berkeadilan Pancasila		Tujuan Ka OPD													
		1. Indeks Harmoni Sosial		Indikator tujuan Ka OPD													
sebaran Ka OPD		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama		Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan		Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat		Meningkatnya Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi									
Indikator sebaran Ka OPD		IK : 1. Indeks Toleransi 2. Indeks Kerjasama		IK : 1. Indeks Keragaman 2. Indeks Pluralisme		IK : Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		IK : Indeks Kebebasan									
sebaran subid		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat		Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akutisasi Nilai-Nilai Pancasila		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Meningkatnya ketrampilan penguasaan terhadap Organisasi Masyarakat									
Indikator subid		IK : Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi IK : Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya		IK : Persentase Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akutisasi Nilai-Nilai Pancasila		IK : Persentase pelaksanaan RAD oleh Timdu PES dan Tim Wadid		IK : Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif									
								Meningkatnya etika dan budaya Politik									
								IK : Persentase Pendidikan Politik pada Kader Parti Politik dan masyarakat									
								IK : Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik									
Bengkalis, Juni 2025																	
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS																	
AGUS SRYAN, S.STP.MPA Pembina Utama Muda NIP. 19790816 199802 1 001																	



Hubungan cascading dan proses bisnis yang baik dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterkaitan antara cascading kinerja dengan peta proses bisnis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan diturunkan secara sistematis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selanjutnya diimplementasikan melalui proses bisnis utama organisasi. Peta proses bisnis berperan sebagai instrumen operasional yang memastikan bahwa setiap target kinerja memiliki alur pelaksanaan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, cascading kinerja memberikan arah strategis, sedangkan proses bisnis memastikan efektivitas pelaksanaan dalam menghasilkan output yang berdampak pada pencapaian outcome. Ke depan, penguatan keterkaitan ini terus dilakukan melalui penyempurnaan desain proses bisnis berbasis outcome sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.
- 3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, umum dan kepegawaian.
- 4) Pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, umum dan kepegawaian.

- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Ideologi, wawasan kebangsaan, pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:
 - a) pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
 - b) penyusunan standar operasional dan prosedur serta perumusan kebijakan teknis pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
 - c) pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa yang meliputi: Ideologi, wawasan kebangsaan, Paskibraka (pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka), bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan;

- d) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa yang meliputi: Ideologi, wawasan kebangsaan, Paskibraka (pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka), bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan; dan
 - e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Politik Dalam Negeri

- 1) Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. penyusunan standar operasional dan prosedur serta perumusan kebijakan teknis pada bidang Politik Dalam Negeri;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,

pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan

1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama, dan organisasi kemasyarakatan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a) pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;

b) penyusunan standar operasional dan prosedur serta perumusan kebijakan teknis pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;

c) pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

d) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan

- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- 1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, dan penanganan konflik.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a) pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b) penyusunan standar operasional dan prosedur serta perumusan kebijakan teknis pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - c) pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
 - d) pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - e) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; dan
 - f) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- 3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
3. Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
4. Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
5. Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedanya.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
8. Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a), Pejabat Administrator (Eselon III.a), Pejabat Pengawas (Eselon IV.a), Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.
9. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah ASN dan Non ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis

No	Jabatan	Formasi Pegawai yang ada																Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi							Jml	Kualifikasi							Laki-laki	Perempuan
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		
1	2	3	4							5	6							7	8
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	S3							1	1							1	
B.	Jabatan Administrasi																		
	1. Administrator	5		S2	S1					5		3	2					5	
	2. Pengawas	1			S1					1			1					1	
	3. Pelaksana	15		S2	S1	D3	SMA			15		1	10		3		1	6	9
C.	Jabatan Fungsional	4			S1					4		1	3					3	1
	Jumlah	26								26								16	10

Jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebanyak **26 orang**, terdiri dari 1 orang Jabatan Pimpinan Tinggi, 23 orang Jabatan Administrasi, dan 4 orang Jabatan Fungsional.

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 18 laki-laki dan 10 perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 17 orang, diikuti S2 sebanyak 6 orang dan S3 sebanyak 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas sumber daya manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah didukung oleh SDM yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- D. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bengkalis berada pada konteks dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kebangsaan yang semakin kompleks. Perubahan pola komunikasi politik,

perkembangan teknologi informasi, meningkatnya potensi polarisasi sosial, serta tantangan disintegrasi ideologi menuntut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terus beradaptasi dalam menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan penguatan ketahanan ideologi serta stabilitas politik daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan kualitas demokrasi, serta mengelola potensi konflik sosial-politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menghadapi berbagai isu yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam pembangunan demokrasi dan ketahanan nasional di tingkat daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berupaya menyelaraskan kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, sekaligus memastikan bahwa program-program penguatan ideologi Pancasila, pendidikan politik, kewaspadaan nasional, serta ketahanan sosial budaya dapat berjalan efektif dan berdampak nyata bagi Masyarakat.

1.1 Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan kondisi tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, antara lain:

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta kondisi objektif di lapangan, terdapat beberapa isu strategis utama yang menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Masih terdapat tantangan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat perdesaan. Pengaruh globalisasi, media sosial, dan arus informasi yang tidak terfilter berpotensi melemahkan rasa kebangsaan dan nasionalisme.

2. Stabilitas Politik dan Kualitas Demokrasi Lokal.

Partisipasi politik masyarakat belum merata dan masih terdapat potensi konflik horizontal menjelang dan selama penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang memerlukan pengelolaan yang lebih sistematis.

3. Penguatan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Konflik Sosial.

Potensi konflik sosial berbasis SARA, ekonomi, dan politik masih menjadi risiko bagi stabilitas daerah. Mekanisme deteksi dini, pelaporan, dan penanganan konflik perlu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor.

4. Sinergi Antar Lembaga dalam Urusan Kesbangpol.

Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga vertikal masih perlu ditingkatkan agar program pencegahan konflik dan penguatan kebangsaan lebih terintegrasi.

5. Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur dalam menangani isu-isu strategis Kesbangpol menjadi tantangan dalam optimalisasi kinerja. Diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penguatan sistem kerja berbasis kinerja.

1.2. Permasalahan Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan evaluasi kinerja dan kondisi lapangan, permasalahan utama yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Terbatasnya jangkauan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Program sosialisasi belum menjangkau seluruh kecamatan dan desa secara merata, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
2. Potensi polarisasi sosial-politik yang masih tinggi. Polarisasi berbasis identitas politik, agama, dan etnis masih berpotensi mengganggu harmoni sosial jika tidak dikelola dengan baik.
3. Sistem pemantauan dan data konflik yang belum optimal. Basis data terpadu terkait potensi konflik sosial-politik belum sepenuhnya terbangun secara sistematis dan terintegrasi.
4. Keterbatasan anggaran untuk program strategis. Alokasi anggaran belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya tantangan yang dihadapi dalam urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat. Mekanisme kolaborasi dengan perangkat daerah lain belum berjalan optimal dalam pendekatan pencegahan konflik dan penguatan kebangsaan.

Isu strategis dan permasalahan utama tersebut berimplikasi langsung terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain:

- a. Perlunya perencanaan program yang lebih berbasis data dan risiko.
- b. Penguatan indikator kinerja yang berorientasi pada outcome, bukan sekadar output.
- c. Peningkatan sinergi dengan provinsi dan pusat dalam penyelenggaraan urusan Kesbangpol.
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

1.3. Arah Kebijakan Menjawab Isu dan Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menjawab isu dan permasalahan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memperluas jangkauan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan berbasis komunitas.
2. Memperkuat sistem kewaspadaan dini dan pemetaan potensi konflik.
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan TNI/Polri dan tokoh masyarakat.
4. Mengoptimalkan penggunaan anggaran berbasis kinerja dan prioritas strategis.
5. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih terukur.

E. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengoordinasikan kegiatan. Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap OPD dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

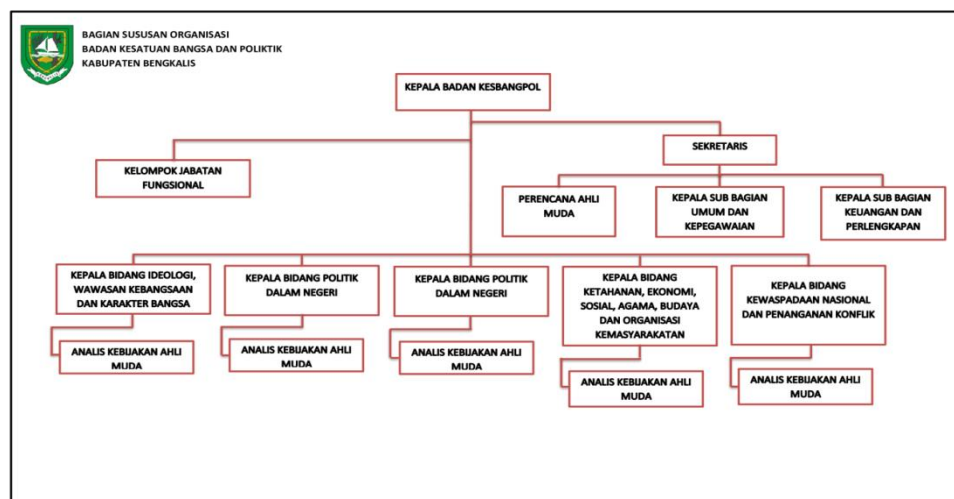
Adapun susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis bahwa susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Perencana Ahli Muda
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- d. Bidang Politik, terdiri dari:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda

Bagian Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Bagian Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis



F. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

B. Analisis Kinerja

C. Realisasi Anggaran

D. Analisis Efisiensi

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis disusun sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan.

Perencanaan kinerja dimaksudkan untuk memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*) diterapkan untuk mendorong pencapaian outcome yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas politik, harmoni sosial, dan ketahanan ideologi di Kabupaten Bengkalis.

Dalam penyusunannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempertimbangkan kondisi aktual daerah, isu strategis, potensi konflik sosial, dinamika politik, serta tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dilakukan agar perencanaan kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata Masyarakat.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, tujuan strategis yang ingin dicapai adalah: *“Terwujudnya penguatan Kesatuan Bangsa dan partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Bengkalis.”*

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya penguatan Kesatuan Bangsa dan partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Bengkalis	Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang komendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatnya pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba	10%	10%	10%	10%	10%

Dalam mencapai visi dan misi Bupati Bengkalis dalam RPJMD serta tujuan strategis yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis memiliki lima (5) program pendukung visi dan misi tersebut, yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

2.3 Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan harmonis	1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu	1.1. Penguatan peran dan partisipatif agamawan dan kelompok-kelompok masyarakat	1.1.1. Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok-kelompok masyarakat di semua level
	2. Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olahraga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba	2.1. Jumlah penghuni tindak pidana Narkoba Lapas kelas II A Bengkalis	2.1.1. Fungsionalisasi kelembagaan serta peran dan fungsi Badan Nasiona Narkotika Kabupaten

Sementara strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis antara lain :

1. Membina karakter dan mental yang berwawasan kebangsaan, penerapan nilai-nilai Pancasila, keragaman suku, agama dan peningkatan rasa nasionalisme kepada masyarakat.
2. Membina kesadaran politik Masyarakat.
3. Meningkatkan peran masyarakat, pemilih pemula dan perempuan dalam demokrasi melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan baik melalui media (elektronik dan publikasi) dan tatap muka.
4. Meningkatkan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan
5. Meningkatkan kualitas kerjasama pencegahan dan penanggulangan narkoba

Adapun beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2021-2026 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan mental dan karakter yang berwawasan kebangsaan, peningkatan rasa nasionalisme/bela negara
2. Menyelenggarakan kerjasama peningkatan kualitas pendidikan politik kepada fungsionaris parpol dan pengurus lembaga pendidikan
3. Mengoptimalkan fungsi penyuluhan dan sosialisasi media kepada masyarakat

4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kepada Organisasi Kemasyarakatan
5. Mengefektifkan dan mengoptimalkan Tugas dan Fungsi Tim P4GN dan BNNK

2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 merupakan komitmen dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis yang terukur dan berorientasi pada hasil. Secara umum, sasaran dan target kinerja Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung terciptanya stabilitas sosial politik daerah serta penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila	Meningkatnya Nilai Wawasan Kebangsaan	Indeks Harmoni Sosial	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
		Indeks Harmoni Religius	6,5	6,5	6,6	6,7	6,8
		Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	70,05	70,05	70,10	70,15	70,20
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75	74	74	75	75
	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Pada Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menetapkan tujuan yaitu *Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila*. Tujuan ini diwujudkan melalui beberapa sasaran strategis yang berfokus

pada peningkatan wawasan kebangsaan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta penguatan integritas dan manajemen risiko Perangkat Daerah.

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai-nilai wawasan kebangsaan yang diukur melalui Indeks Harmoni Sosial sebesar 6,5, Indeks Harmoni Religius sebesar 6,5, serta persentase fasilitasi penanganan konflik sosial sebesar 70,05%. Selain itu, dalam aspek tata kelola pemerintahan, ditargetkan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 75. Dalam rangka pencegahan korupsi, seluruh ASN ditargetkan berpartisipasi 100% dalam Survei Penilaian Integritas (SPI). Sementara itu, pada aspek manajemen risiko, ditargetkan tersusunnya 1 dokumen peta risiko perangkat daerah.

2.5 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program, kegiatan, sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Program, kegiatan, sub kegiatan terkait langsung pencapaian sasaran
berdasarkan DPPA Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Nilai Wawasan Kebangsaan	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.323.364.257	3.361.759.614	38.395.357
	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	3.323.364.257	3.361.759.614	38.395.357
		1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48.901.689	302.959.631	254.057.942
		2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	237.975.753	139.156.000	(98.819.753)
		3. Pembentukan Paskibraka	2.970.473.615	2.919.643.983	(50.829.632)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.723.320.386	5.538.457.788	815.137.402
	3.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.723.320.386	5.538.457.788	815.137.402
	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	149.999.456	115.255.880	(34.743.576)
	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.511.426.979	5.365.349.855	853.922.876
	3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	61.893.951	57.852.053	(4.041.898)
	04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	428.786.799	400.894.963	27.891.836
	4.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	428.786.799	400.894.963	(27.891.836)
	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	88.972.690	62.201.464	(26.771.226)
	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	289.814.564	305.409.020	15.594.456
	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	49.999.545	33.284.479	(16.715.066)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	499.311.120	258.295.761	241.015.359
	5.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	499.311.120	258.295.761	(241.015.359)
	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	149.998.820	64.637.461	(85.361.359)
	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300.000.000	158.460.000	(141.884.000)
	3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	48.968.300	35.198.300	(13.770.000)
	06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.115.756.497	2.282.388.796	1.166.632.299
	6.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.115.756.497	2.282.388.796	1.166.632.299
	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	49.999.286	24.230.773	(25.768.513)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	299.997.211	161.618.503	(138.378.708)
		3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48.960.000	19.040.000	(29.920.000)
		4 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	716.800.000	2.077.499.520	1.360.699.520
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran			18.886.820.586	20.319.352.230	1.432.531.644

Sumber: Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025

Tabel 2.5
Struktur Program dan Kegiatan Pendukung pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.127.483.461	8.545.781.933	581.701.528
	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	570.279.878	226.672.786	343.607.092
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	418.720.238	226.672.786	192.047.452
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.559.640	-	151.559.640
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.216.325.327	5.869.851.179	(653.525.852)
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.216.325.327	5.869.851.179	(653.525.852)
	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	115.200.000	124.800.000	9.600.000
		1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	115.200.000	124.800.000	9.600.000
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.185.000	-	50.185.000
		1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50.185.000	-	50.185.000
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.405.308.540	992.911.636	412.396.904
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	19.996.290	16.079.994	3.916.296
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.994.097	140.626.265	40.632.168
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.500.000	121.200.000	17.700.000
		4. Penyediaan Barang dan Penggandaan	104.974.153	117.756.377	12.782.224
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	24.800.000	9.800.000
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	941.844.000	526.449.000	415.395.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	120.000.000	46.000.000	74.000.000
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.051.934	59.126.625	258.925.309
	1. Pengadaan Mebel	60.028.000	24.997.500	35.030.500
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	258.023.934	34.129.125	223.894.809
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	598.642.240	627.438.240	28.796.000
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.337.500	92.737.500	7.400.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.991.980	124.491.980	5.500.000
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	383.312.760	410.208.760	26.896.000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853.490.542	644.981.467	(208.509.075)
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	426.480.452	551.196.153	(124.715.701)
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.000.000	-	227.000.000
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.010.090	93.785.314	6.224.776
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-	100.000.000
Total pagu		9.127.483.461	8.545.781.933	581.701.528

Sumber: Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025

2.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen penetapan kinerja yang merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target tahunan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk komitmen penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai dasar pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP), serta menjadi instrumen pengendalian untuk memastikan tercapainya sasaran strategis organisasi secara efektif dan akuntabel.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Bengkalis	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Baik (81,69)
		2	Indeks Kinerja Ormas	Sedang (67)
		3	Indeks Kewaspadaan Nasional	Waspada (75)
2.	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di Kabupaten Bengkalis	Indeks Harmoni Indonesia di Kabupaten Bengkalis		Cukup Harmonis (73)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		BB (75,00)
4.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah		100%
5.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah		1 Dokumen

Pada bulan Mei tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya Penyesuaian kegiatan dan realokasi anggaran, masukan dari Tim Sakip Kabupaten Bengkalis serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan	1	Indeks Harmoni Religius	6,5
		2	Indeks Harmoni Sosial	6,5
		3	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	60
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		75,00
3.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah		100%
4.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah		1 Dokumen

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.8
Program Strategis dan Anggaran Tahun 2025

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.545.781.933,-	APBD P
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.361.759.614,-	APBD P
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.538.457.788,-	APBD P
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	400.894.963,-	APBD P
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	258.295.761,-	APBD P
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.282.388.796,-	APBD P
Total Pagu Anggaran	20.319.352.230	

Berdasarkan tabel di atas, alokasi anggaran pada APBD Perubahan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui 6 (enam) Program Strategis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dialokasikan sebesar Rp8.545.781.933,-. Program ini merupakan program pendukung utama yang mencakup belanja operasional perkantoran, administrasi umum, perencanaan, penganggaran, evaluasi, serta dukungan manajemen ASN. Besarnya alokasi menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas tata kelola organisasi agar pelaksanaan program teknis dapat berjalan efektif dan akuntabel.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dialokasikan sebesar Rp3.361.759.614,-. Anggaran ini diarahkan untuk kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, pembentukan dan pembinaan Paskibraka, serta penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Program ini berperan strategis dalam menjaga ketahanan ideologi dan memperkuat karakter generasi muda. (Melibatkan FPK Kabupaten Bengkalis)
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dialokasikan sebesar Rp5.538.457.788,-. Program ini mendukung fasilitasi partai politik, pendidikan politik masyarakat, serta peningkatan kualitas demokrasi daerah. Alokasi yang relatif besar mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik yang berkualitas. (Bantuan Keuangan kepada Partai Politik)
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dialokasikan sebesar Rp400.894.963,-. Program ini bertujuan meningkatkan tertib administrasi dan peran strategis organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah melalui pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kelembagaan. (Melibatkan Timdu Ormas, Tim Bakorpakem Kabupaten Bengkalis)
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dialokasikan sebesar Rp258.295.761,-. Program ini difokuskan

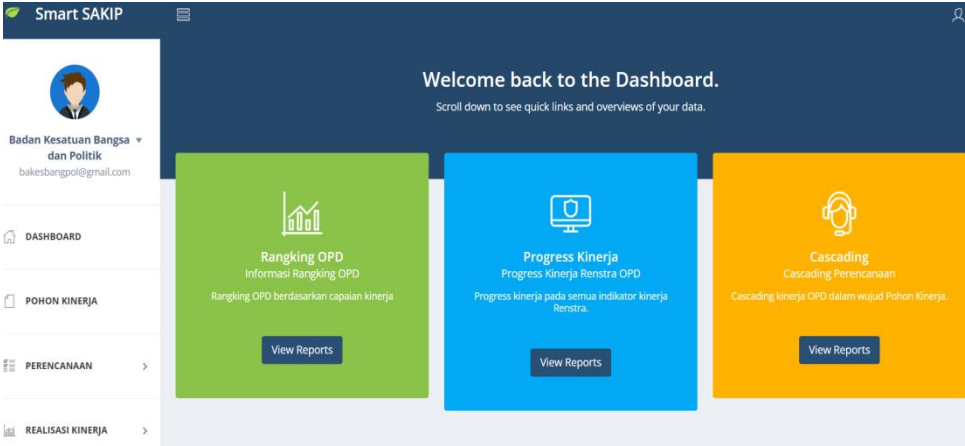
pada penguatan ketahanan masyarakat dalam aspek sosial dan budaya sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah secara komprehensif. (Melibatkan Tim P4GN dan FKUB Kabupaten Bengkalis)

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dialokasikan sebesar Rp2.282.388.796,-. Program ini diarahkan untuk deteksi dini, pemantauan situasi politik dan keamanan daerah, serta fasilitasi penanganan potensi konflik sosial guna menjaga kondusivitas wilayah. (Melibatkan Forkopimda, FKDM dan Timdu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bengkalis)

Secara keseluruhan, struktur penganggaran pada APBD Perubahan menunjukkan keseimbangan antara belanja penunjang operasional dan program teknis substantif. Alokasi terbesar berada pada program penunjang dan pendidikan politik, yang mengindikasikan prioritas pada penguatan tata kelola internal serta peningkatan kualitas demokrasi daerah. Sementara itu, program kewaspadaan nasional tetap menjadi perhatian strategis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah.

Selain itu Instrumen Pendukung Capaian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai upaya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui aplikasi **SICAKEB** (<https://sicakeb.bengkalis.go.id>)





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) serta indikator program dan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna memastikan ketercapaian output, outcome, dan dampak terhadap stabilitas politik serta ketahanan ideologi di Kabupaten Bengkalis.

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan prinsip *result oriented government*, dengan menitikberatkan pada ketercapaian sasaran strategis yang diturunkan secara berjenjang (*cascading*) dari RPJMD Kabupaten Bengkalis ke Renstra Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, hingga indikator kinerja individu.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan pedoman teknis pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan:

- a. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun berjalan;
- b. Realisasi indikator kinerja;
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan;
- d. Efisiensi penggunaan sumber daya;
- e. Dampak (outcome) terhadap sasaran pembangunan daerah.

Pengukuran dengan pendekatan ini memastikan bahwa pelaporan kinerja tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran (*budget oriented*), tetapi pada hasil yang dirasakan masyarakat (*performance oriented*).

1. Membandingkan antara Target kinerja dan Realisasi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah

tercapai sesuai target yang ditetapkan, baik pada level sasaran strategis maupun indikator program. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung stabilitas politik daerah, penguatan wawasan kebangsaan, serta peningkatan kualitas demokrasi.

Capaian kinerja Tahun 2025 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja utama.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi fokus utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Capaian masing-masing sasaran dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	TAHUN 2025			
				Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Indeks Harmoni Religius	Skor	6,5	6,67	102	Sangat Tinggi
		Indeks harmoni Sosial	Skor	6,5	6,67	102	Sangat Tinggi
		Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase	60	60	100	Sangat Tinggi

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial, toleransi antarumat beragama, serta stabilitas sosial politik di Kabupaten Bengkalis.

a. Indeks Harmoni Religius

Indeks Harmoni Religius (target 6,5) menggambarkan tingkat toleransi, kerja sama, dan kerukunan antarumat beragama. Target sebesar 6,5 menunjukkan kategori **cukup harmonis menuju harmonis**. Indikator ini bersifat outcome karena mencerminkan dampak pembinaan terhadap kondisi sosial masyarakat. Capaian sebesar 102% menunjukkan bahwa target kinerja telah terlampaui. Peningkatan skor Indeks Harmoni Religius mencerminkan semakin

kondusifnya hubungan antarumat beragama di Kabupaten Bengkalis. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh optimalisasi fasilitasi forum kerukunan umat beragama, dialog lintas agama, serta deteksi dini potensi konflik berbasis keagamaan.

b. Indeks Harmoni Sosial

Indeks Harmoni Sosial (target 6,5) mengukur tingkat kohesi sosial, solidaritas, dan minimnya gesekan antar kelompok masyarakat. Strategi pencapaian meliputi Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan, Pendidikan wawasan kebangsaan, Pembinaan organisasi kemasyarakatan. Target 6,5 menunjukkan kondisi sosial yang relatif stabil dan terkendali.

c. Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Target 60%)

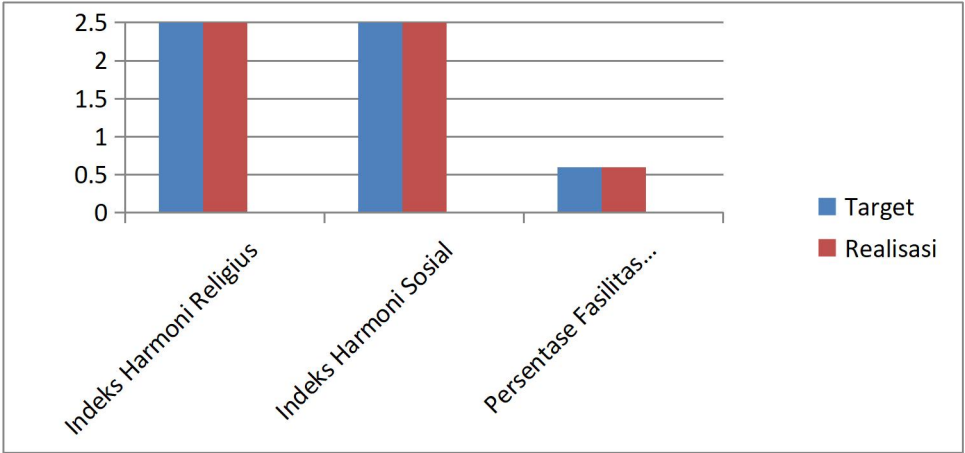
Indikator ini mengukur responsivitas perangkat daerah dalam memfasilitasi penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Realisasi yang melampaui target menunjukkan meningkatnya kohesi sosial dan stabilitas sosial masyarakat. Hal ini didukung oleh kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan ketahanan ideologi, serta koordinasi lintas sektor dalam pencegahan konflik sosial.

Capaian 100% menunjukkan seluruh konflik sosial yang teridentifikasi telah difasilitasi sesuai kewenangan perangkat daerah. Hal ini menggambarkan responsivitas dan efektivitas sistem deteksi dini serta koordinasi lintas instansi dalam menjaga stabilitas daerah.

Analisis Sasaran 1, Secara keseluruhan, sasaran Meningkatnya Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan menunjukkan kinerja sangat berhasil dengan seluruh indikator berada pada kategori Sangat Tinggi. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas program pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Adapun capaian sasaran terpeliharanya kesatuan bangsa dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.1
Sasaran meningkatnya nilai-nilai wawasan kebangsaan



2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	TAHUN 2025			
				Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat	75	74	98	Sangat Tinggi

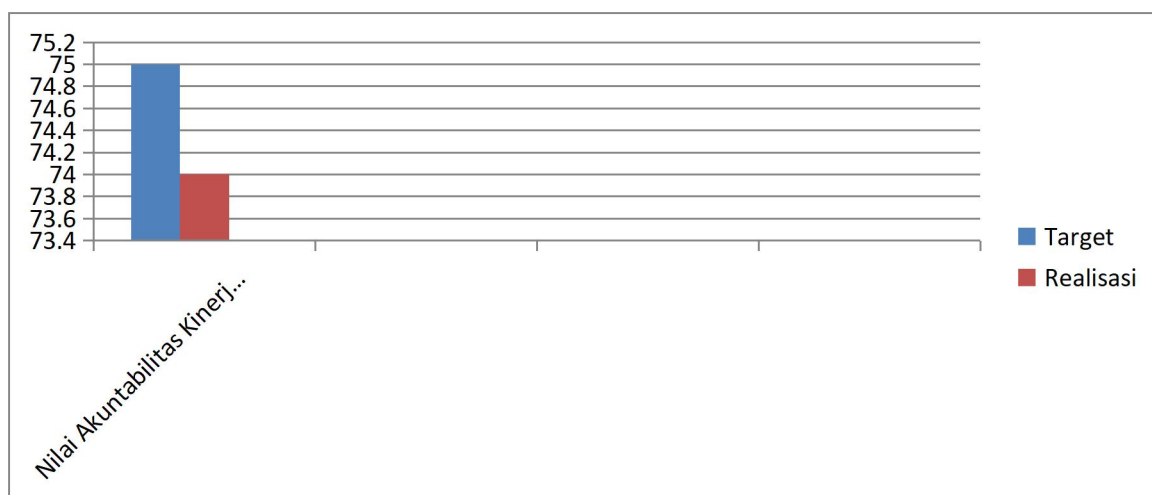
Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Target 75,00. Sasaran ini menegaskan komitmen penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Target nilai 75,00 berada

pada kategori “**BB**” (**Sangat Baik**), yang berarti perencanaan telah berbasis kinerja, indikator telah berorientasi outcome, pelaporan telah terukur dan konsisten, dan terdapat keselarasan antara anggaran dan kinerja.

Upaya pencapaian dilakukan melalui Penyempurnaan cascading kinerja, Reviu Perjanjian Kinerja secara periodik, Monitoring dan evaluasi berbasis indikator. Realisasi sebesar 74,00 atau 98% dari target menunjukkan bahwa meskipun target belum sepenuhnya tercapai, tingkat akuntabilitas tetap berada pada kategori Sangat Tinggi. Selisih 1 poin dipengaruhi oleh beberapa aspek evaluasi seperti konsistensi cascading kinerja, penguatan evaluasi internal, dan kualitas pengukuran outcome.

Analisis Sasaran 2, Kinerja tetap menunjukkan tren positif dan stabil. Ke depan diperlukan penguatan quality control atas dokumen perencanaan dan pelaporan, serta peningkatan kualitas eviden dukung pada setiap indikator kinerja. Dalam LHE AKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2024 telah melakukan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Dalam rangka tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan kegiatan sebagai berikut :

Grafik sasaran 3.2
Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Tabel 3.4
Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progres Penyesuaian
1	Menyelaraskan antara perjanjian kinerja Eselon II dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 untuk menyelaraskan antara Perjanjian Kinerja Eselon II dan Indikator Kinerja Utama (IKU), PK Eselon II harus menjadi turunan langsung dari IKU, sehingga capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik benar-benar berkontribusi pada hasil strategis OPD.	- Telah melakukan revisi Perjanjian Kinerja Eselon II pada Bulan Mei 2024 - Menyempurnakan indikator PK Eselon II dengan melakukan perubahan agar selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
2	Menyelaraskan antara Perjanjian Kinerja Eselon II dan III dengan Pohon Kinerja	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 dengan Menyelaraskan antara Perjanjian Kinerja Eselon II dan III dengan Pohon Kinerja. Indikator Eselon III diambil dari pohon kinerja dan merupakan faktor input yang memengaruhi persentase peningkatan penanganan konflik di daerah pada level Eselon II, sehingga berkontribusi pada IKU persentase penurunan potensi konflik	Telah dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja Eselon II dan III dengan Pohon Kinerja pada bulan Mei tahun 2024 menyesuaikan penyempurnaan indikator PK Eselon II dengan IKU OPD agar kinerja perangkat daerah konsisten dari level Kepala Badan (Eselon II) hingga Eselon III, Eselon IV, kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana
3	Melakukan pemantuan Rencana Aksi atas kinerja agar dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 dengan Melakukan pemantuan Rencana Aksi atas kinerja dengan mengidentifikasi progres pelaksanaan rencana aksi, mengukur capaian terhadap indikator, serta menganalisis penyebab ketidaktercapaian	Telah dilakukan perbaikan dan merumuskan hambatan /kendala yang terjadi pada triwulan III rencana aksi sehingga segera diusulkan solusi terhadap hambatan dimaksud
4	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 dengan: - Melakukan agenda rapat yang berisikan arahan dan pembinaan dari Kepala Badan kepada Kabid, Fungsional, Struktural dan Pelaksana untuk berkomitmen mencapai target kinerja - Melaksanakan movev capaian target kinerja triwulan melalui aplikasi sicakeb	Telah dilaksanakan rapat bersama Kepala Badan dan seluruh jajaran Kesbangpol dengan arahan untuk memahami tugas dan fungsi masing-masing, sehingga kinerja yang sudah dilaksanakan mendapatkan tunjangan kinerja dengan memperhatikan Perbup Nomor 92 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progres Penyesuaian
5	Memfaatkan pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dalam mencapai kinerja informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan dan penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 dengan: - Melakukan monev terhadap hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai efektivitas strategi, kebijakan, dan aktivitas yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan Rencana Kerja. Informasi yang dihasilkan dari pengukuran kinerja, sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja, digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian sasaran serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi. - Dilakukan penyesuaian terhadap strategi, prioritas kebijakan, serta perbaikan aktivitas operasional guna memastikan bahwa perencanaan kinerja pada periode berikutnya menjadi lebih tepat sasaran, responsif, dan selaras dengan sasaran OPD. Dengan harapan pengukuran kinerja tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja berkelanjutan.	Laporan LKJIP tahun 2024 telah menyajikan Informasi dari pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi capaian keberhasilan serta melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, dan aktivitas pelaksanaan agar perencanaan kinerja berikutnya lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
6	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian semua pegawai atas hasil pengukuran kinerja	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 dengan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan kepedulian semua pegawai atas hasil pengukuran kinerja, Kepala Badan melakukan sosialisasi berkala terkait capaian kinerja melalui rapat internal jajaran Kesbangpol seperti rapat evaluasi triwulanan, penyampaian dashboard kinerja (SKP) masing-masing Eselon, dan diseminasi laporan capaian.	Upaya telah dilakukan untuk membangun dan memperkuat pemahaman yang baik terhadap hasil pengukuran kinerja dalam mendorong perbaikan berkelanjutan serta memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kontribusi yang selaras dengan sasaran OPD. Melalui rapat internal, ASN jajaran Kesbangpol memperoleh informasi mengenai tingkat pencapaian target, isu-isu yang menghambat kinerja, serta langkah perbaikan yang dilakukan
7	Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan perbandingan target kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan penjelasan yang tepat dan mudah dipahami	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 dengan: - Penyajian laporan kinerja yang dilengkapi penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan capaian, baik dari aspek internal maupun eksternal. - Tingkat konsistensi pemenuhan target, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan kinerja disampaikan untuk upaya perbaikan laporan kinerja	Telah dilakukan penyajian naratif pada laporan kinerja untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kinerja OPD yang memuat analisis perubahan capaian, termasuk penjelasan mengenai kondisi internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja serta menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan penetapan target pada tahun berikutnya

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progres Penyesuaian
8	Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 dengan: - Menetapkan jadwal monitoring kinerja secara triwulanan dan bulanan terhadap seluruh indikator program dan kegiatan. - Mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal	Telah dilakukan serangkaian penyesuaian untuk mengatasi deviasi capaian kinerja serta menjawab hambatan yang teridentifikasi. Penyesuaian dilakukan melalui perbaikan strategi, penataan ulang prioritas kegiatan, serta penguatan koordinasi lintas unit.
9	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana aksi	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 dengan: Melakukan evaluasi rencana aksi dengan menelaah dokumen pelaksanaan, pemantauan capaian indikator perbaikan, serta koordinasi dengan masing-masing bidang/PPTK penanggungjawab kegiatan pada rapat dan melalui whatsapp group	Telah diimplementasikan sesuai rekomendasi evaluasi, baik dalam bentuk penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan, penyempurnaan mekanisme penyuluhan/sosialisasi, maupun penguatan koordinasi bersama OPD terkait beberapa aspek masih berada dalam tahap penyempurnaan, terutama terkait kegiatan yang memerlukan tambahan dukungan anggaran, kapasitas SDM, serta penyesuaian terhadap dinamika eksternal
10	Memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 dengan: - Perbaikan pada indikator dan sasaran kinerja, penguatan koordinasi dan integrasi perencanaan penganggaran, serta peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi internal - Penyelarasan indikator dengan tujuan dan sasaran strategis, penyusunan Renja berbasis kinerja, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi	Beberapa langkah penyesuaian telah dilaksanakan, terutama dalam hal penyempurnaan indikator kinerja, penyelarasan program dan kegiatan, serta penguatan koordinasi internal. Beberapa kegiatan yang membutuhkan kerja lintas bidang masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Penyesuaian akan terus diakselerasi agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan sesuai rencana aksi.
11	Melakukan pemantauan Rencana Aksi atas kinerja yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024 dengan: - Melakukan pemantauan dengan monitoring triwulanan, rapat pengendalian internal, dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan -	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi kinerja telah dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar Rencana Aksi telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan, sementara beberapa kegiatan lainnya masih memerlukan penyesuaian dalam aspek waktu pelaksanaan dan penguatan koordinasi dengan OPD terkait

3. Sasaran Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

Tabel 3.5

Capaian Sasaran Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	TAHUN 2025			
				Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Target 100%. Target 100% menunjukkan komitmen penuh terhadap transparansi dan penguatan budaya integritas. Indikator ini menekankan partisipasi aktif seluruh ASN, keterbukaan terhadap evaluasi integritas, penguatan zona integritas dan pengendalian internal.

Partisipasi penuh dalam SPI menjadi dasar dalam membangun sistem pencegahan korupsi berbasis risiko. Seluruh ASN berpartisipasi dalam SPI internal, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda pencegahan korupsi dan pembangunan zona integritas.

Analisis Sasaran 3 Capaian 100% mencerminkan budaya organisasi yang semakin sadar integritas dan transparansi. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Grafik sasaran 3.3

Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas



4. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Tabel 3.6
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko
Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	TAHUN 2025			
				Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	Sangat Tinggi

Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah Target 1 Dokumen. Penyusunan 1 dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah merupakan bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis manajemen risiko. Dokumen ini memuat:

- Identifikasi risiko strategis
- Analisis tingkat kemungkinan dan dampak
- Rencana mitigasi risiko
- Pengendalian internal yang terukur

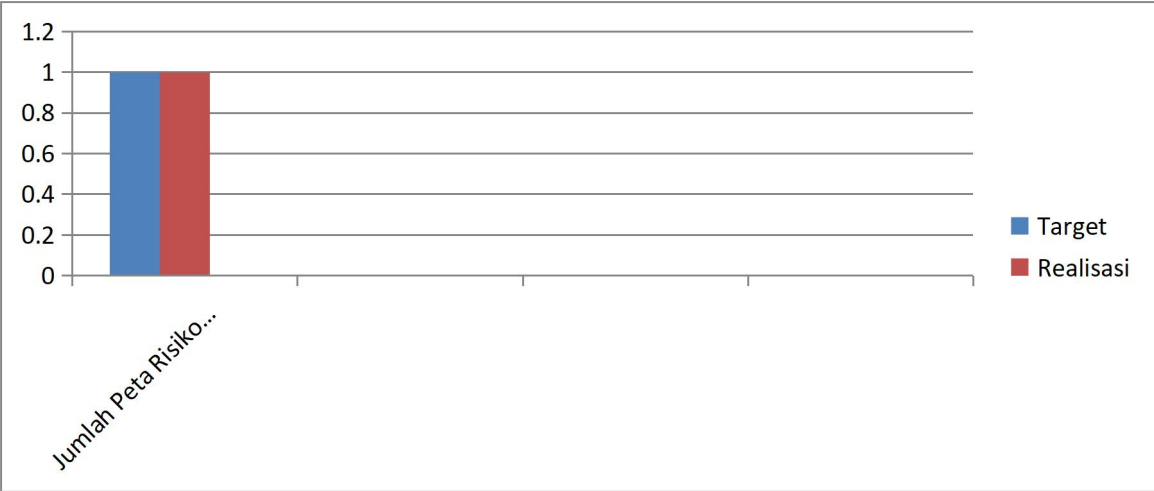
Peta risiko menjadi instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, serta meminimalkan potensi kegagalan pencapaian target.

Keempat sasaran strategis Tahun 2025 menunjukkan bahwa fokus kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tidak hanya pada stabilitas sosial politik, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan berbasis manajemen risiko. Dokumen peta risiko telah tersusun dan diperbaharui sesuai ketentuan, sebagai bagian dari implementasi SPIP terintegrasi.

Analisis Sasaran 4, Capaian ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengendalian intern. Ke depan perlu ditingkatkan pada aspek kualitas mitigasi risiko dan integrasinya dalam perencanaan serta penganggaran. Kesimpulan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **sangat baik**, dimana seluruh indikator kinerja strategis berada pada kategori **Sangat Berhasil** dengan tingkat capaian antara **98%**

hingga 102%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan kehidupan berbangsa di Kabupaten Bengkalis.

Grafik Sasaran 3.4
Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah



Tabel 3.7
Analisis Capaian Target, Realisasi, dan
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Indeks Harmoni Religius	6,5	6,67	102	Sangat Berhasil
		Indeks Harmoni Sosial	6,5	6,67	102	Sangat Berhasil
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	60	60	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	75	74	98	Sangat Berhasil
3	Terwujudnya Pencegahan Korupsi	Partisipasi ASN dalam SPI	100	100	100	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Manajemen Risiko	Dokumen Peta Risiko	1	1	100	Sangat Berhasil

Analisis Umum Capaian

Rata-rata capaian indikator berada di atas 100%, menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya memenuhi target, tetapi melampaui ekspektasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian tertinggi terdapat pada indikator Indeks Harmoni Religius dan Indeks Harmoni Sosial Fasilitasi (102%) diikuti Penanganan Konflik Sosial (100%), yang menunjukkan peningkatan responsivitas dan efektivitas koordinasi lintas sektor. Tidak terdapat indikator yang berada pada kategori “Tidak Berhasil”, sehingga secara agregat kinerja Tahun 2025 berada pada kategori Sangat Baik.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Efektivitas diukur dari perbandingan antara capaian kinerja dan target yang ditetapkan. Jika Rata-rata capaian kinerja = 102% Realisasi anggaran = 96% maka Kinerja melampaui target dengan tingkat serapan anggaran di bawah 100%, menunjukkan efektivitas pelaksanaan program.

Artinya output dan outcome tercapai optimal tanpa harus menghabiskan seluruh pagu anggaran.

Tabel 3.8
Efisiensi Anggaran tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Efisiensi Anggaran
1	Meningkatnya Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Indeks Harmoni Religius	6,67	3.361.759.614	3.287.636.878	2,21
		Indeks Harmoni Sosial	6,67	3.361.759.614	3.287.636.878	2,21
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	60	8.480.037.308	8.057.932.738	4,98
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	74	8.545.781.933	7.060.105.180	17,3

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penggunaan anggaran Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja indikator strategis yang berada pada kategori sangat berhasil dengan tingkat capaian antara 98 persen hingga

102 persen, sementara penggunaan anggaran tetap terkendali sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efektif melalui perencanaan kegiatan yang berbasis kinerja, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran yang digunakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, secara umum capaian kinerja menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator kinerja yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan bahkan beberapa di antaranya melampaui target kinerja.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial dan politik di daerah.

Ke depan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis akan terus melakukan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program serta memperkuat sistem evaluasi kinerja guna memastikan bahwa capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3.9

**Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2023–2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Keterangan
1	Meningkatnya Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Indeks Harmoni Religius	6,5	6,5	6,67	Meningkat
		Indeks Harmoni Sosial	6,5	6,5	6,67	Meningkat
		Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	60	60	60	Stabil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	73,20	74	74	Meningkat
3	Terwujudnya Pencegahan Korupsi	Partisipasi ASN dalam SPI	100	100	100	Stabil Tinggi
4	Meningkatnya Manajemen Risiko	Dokumen Peta Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Konsisten

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, secara umum capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang positif dan stabil. Hal ini terlihat dari beberapa indikator strategis yang mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya.

Indikator Indeks Harmoni Religius dan Indeks Harmoni Sosial menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya tingkat kerukunan antar umat beragama serta harmonisasi sosial di masyarakat. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, dialog lintas agama, serta penguatan komunikasi antar kelompok masyarakat.

Sementara itu, indikator Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial menunjukkan capaian yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa setiap potensi konflik sosial yang muncul dapat difasilitasi penyelesaiannya secara cepat dan tepat sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Pada aspek akuntabilitas kinerja perangkat daerah, nilai AKIP menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Hal ini mencerminkan adanya

perbaikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja.

Selain itu, indikator yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dan penerapan manajemen risiko menunjukkan capaian yang konsisten. Tingginya partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) serta tersusunnya dokumen peta risiko organisasi menjadi indikator komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Renstra
Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Target Renstra (Tahun 2025)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Indeks Harmoni Religius	6,5	6,5	6,67	102
		Indeks Harmoni Sosial	6,5	6,5	6,67	102
		Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	60	60	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	75	73	74	98
3	Terwujudnya Pencegahan Korupsi	Partisipasi ASN dalam SPI	100	100	100	100
4	Meningkatnya Manajemen Risiko	Dokumen Peta Risiko	1	1	100	100

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja organisasi telah sesuai dengan arah perencanaan jangka menengah. Analisis ini juga menjadi dasar dalam mengevaluasi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target yang telah direncanakan.

Berdasarkan tabel perbandingan antara target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target Renstra Tahun 2025, dan realisasi kinerja, secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui

target yang ditetapkan dalam Renstra. Kinerja yang telah ditetapkan tahun 2025 sebelumnya tidak tercantum dalam tujuan, sasaran dan indikator Renstra, hal ini disebabkan tidak dilakukan revisi Renstra PD namun dilakukan penyesuaian pada cascading/pohon kinerja PD sesuai hasil revid Renstra Perangkat Daerah.

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan**, seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian yang sangat baik. Indikator **Indeks Harmoni Religius** dan **Indeks Harmoni Sosial** masing-masing memiliki target Renstra sebesar 6,5 dan berhasil direalisasikan sebesar 6,67 atau mencapai 102 persen dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membangun kerukunan antar umat beragama serta memperkuat harmoni sosial di masyarakat berjalan dengan baik dan efektif.

Untuk indikator **Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**, target yang ditetapkan sebesar 60 persen, sementara realisasi mencapai 100 persen. Dengan demikian capaian kinerja mencapai 100 persen dari target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial yang dilakukan telah berjalan optimal sehingga seluruh potensi konflik sosial yang terjadi dapat difasilitasi penyelesaiannya secara efektif.

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, indikator **Nilai AKIP Perangkat Daerah** memiliki target Renstra sebesar 73 dengan target Perjanjian Kinerja sebesar 75. Realisasi yang dicapai sebesar 74 atau setara dengan capaian 98 persen terhadap target Perjanjian Kinerja. Walaupun belum sepenuhnya mencapai target PK, namun capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga secara umum kinerja akuntabilitas Badan Kesbangpol masih berada dalam kategori baik.

Sementara itu pada sasaran strategis **Terwujudnya Pencegahan Korupsi**, indikator **Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI)** memiliki target Renstra sebesar 100 persen dan berhasil direalisasikan sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan komitmen seluruh aparatur dalam mendukung upaya pencegahan korupsi serta penguatan integritas di lingkungan perangkat daerah.

Selanjutnya pada sasaran strategis **Meningkatnya Manajemen Risiko**, indikator **Dokumen Peta Risiko** memiliki target penyusunan sebanyak 1 dokumen dan berhasil direalisasikan seluruhnya atau mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan di Badan Kesbangpol telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah **mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan**. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah berjalan secara efektif dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, secara umum capaian indikator kinerja menunjukkan kategori **Sangat Berhasil** dengan persentase capaian antara **98% sampai dengan 102%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan efektif serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Adapun analisis terhadap faktor penyebab keberhasilan serta upaya yang telah dilakukan dijelaskan sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis

Meningkatnya Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan

Capaian indikator **Indeks Harmoni Religius** dan **Indeks Harmoni Sosial** menunjukkan nilai realisasi sebesar 6,67 dari target 6,5 atau dengan capaian 102%. Demikian pula pada indikator Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Terjalannya koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat.
- b. Pelaksanaan program pembinaan wawasan kebangsaan, dialog kebangsaan, serta kegiatan penguatan kerukunan umat beragama yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- c. Optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan unsur masyarakat dalam menjaga kondusivitas kehidupan sosial masyarakat.
- d. Respons cepat pemerintah daerah melalui fasilitasi penyelesaian potensi konflik sosial sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Adapun alternatif solusi yang terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan intensitas kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- b. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
- c. Mengoptimalkan peran organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan sosial.

Adapun penjelasan kegiatan pada masing-masing program yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sasaran Kegiatan ini adalah Penguatan Pembinaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan total pagu yang digunakan sebesar Rp.3.361.759.614,- untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- Penyuluhan bela Negara.
- Penyuluhan wawasan kebangsaan.
- Penyuluhan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila.
- Hibah uang kepada FPK Kabupaten Bengkalis.
- Pembinaan kepada Paskibraka dan Purnapaskibraka.
- Sosialisasi pembentukan dan penumbuhan karakter bagi keluarga (PKK).

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaun Situasi Politik

Sasaran Kegiatan ini adalah Penguatan Pembinaan Politik dan Pendidikan Politik, dengan total pagu yang digunakan sebesar Rp.5.538.457.788,- untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- Penyuluhan pendidikan politik kepada pemilih pemula.
- Rapat koordinasi tim verifikasi bantuan administrasi keuangan kepada parpol.
- Monitoring situasi politik daerah.
- Hibah uang kepada parpol.

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sasaran Kegiatan ini adalah Pemantapan Pembinaan dan Pengawasan Ormas, dengan total pagu yang digunakan sebesar Rp.400.894.963,- untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi pembinaan kepada pengurus Ormas tentang keormasan.
- Rapat koordinasi Tim BAKORPAKEM.
- Rapat koordinasi Timdu Ormas.
- Monitoring keberadaan Ormas di kecamatan.

4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sasaran kegiatan ini adalah Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan total pagu yang digunakan sebesar Rp.258.295.761,- untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- Rapat Koordinasi Tim P4GN.
- Hibah uang kepada FKUB Kabupaten Bengkalis.
- Monitoring keberadaan Ormas di kecamatan.

5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sasaran Kegiatan ini adalah Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan total pagu yang digunakan sebesar Rp.2.282.388.796,- untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Timdu Penanganan Konflik Sosial.
- Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Bengkalis.
- Hibah uang kepada FKDM Kabupaten Bengkalis.
- Rapat Koordinasi Tim FORKOPIMDA Kabupaten Bengkalis.

2. Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah memperoleh realisasi 74 dari target 75 dengan capaian 98% yang masih berada pada kategori Sangat Berhasil.

Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola kinerja organisasi, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang semakin baik melalui penyusunan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, serta pelaporan kinerja secara lebih terstruktur.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terhadap capaian kinerja perangkat daerah secara berkala.
- c. Dukungan pembinaan dari Inspektorat serta peningkatan pemahaman aparatur terhadap penyusunan dokumen kinerja.

Adapun upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai AKIP antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja yang lebih berorientasi pada hasil (outcome).

- b. Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja.
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen SAKIP melalui bimbingan teknis dan evaluasi internal secara berkala.

3. Sasaran Strategis

Terwujudnya Pencegahan Korupsi

Indikator Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Peningkatan pemahaman ASN terhadap pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan budaya kerja yang berorientasi pada nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Mendorong penerapan zona integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan perangkat daerah.
- b. Meningkatkan pengawasan internal serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Melakukan sosialisasi berkelanjutan terkait pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur.

4. Sasaran Strategis

Meningkatnya Manajemen Risiko

Indikator Dokumen Peta Risiko telah terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah menerapkan manajemen risiko dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yang didukung oleh:

- a. Komitmen organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

- b. Pembinaan dari Inspektorat daerah terkait implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- c. Peningkatan pemahaman aparatur mengenai identifikasi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan program.

Adapun langkah yang terus dilakukan untuk memperkuat manajemen risiko antara lain:

- a. Melakukan pemutakhiran peta risiko secara berkala sesuai dengan dinamika pelaksanaan program.
- b. Mengintegrasikan pengelolaan risiko dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan.
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Kesimpulan Analisis

Secara keseluruhan, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan mayoritas indikator berada pada kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh perencanaan yang terarah, dukungan koordinasi lintas sektor, serta komitmen aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan akuntabel. Ke depan, upaya peningkatan kualitas perencanaan, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kapasitas aparatur akan terus dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 tidak mengampu kegiatan lain seperti SPM dan SDG's, karena berdasarkan tupoksinya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Capaian Kinerja Pengarusutamaan Gender dalam Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkalis

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan

yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan dan output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yang memperhatikan pemenuhan hak akses atas kelompok afirmatif gender namun tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis diantaranya:

1. Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melibatkan perwakilan PKK.
2. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Politik bagi Perempuan.
3. Paskibraka dalam kegiatan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis antara lain :

- a. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
- b. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja di Kabupaten Bengkalis.
- c. Meningkatnya kebebasan publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima provokasi/pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu, sehingga membuka peluang lebih besar bagi terjadinya konflik.
- d. Menurunnya atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan/pembinaan.
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat, LSM dan partai politik belum berjalan dengan optimal.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan strategi yang tepat dengan mengoptimalkan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
- b. Melakukan berbagai kegiatan baik di masyarakat ataupun di kalangan pelajar untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba melalui koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait.
- c. Memfokuskan pada memberdayakan FKUB, FKDM, FPK, dan lembaga-lembaga yang diwadahi oleh pemerintah/ masyarakat dari tingkat kabupaten sampai desa untuk lebih berperan dalam pencegahan konflik.
- d. Melakukan kegiatan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dan nasionalisme dengan mengubah format pembinaan dengan format baru yang lebih menarik bagi masyarakat.
- e. Menyasar pembinaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme dari berbagai macam kalangan masyarakat baik itu perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, anak-anak.
- f. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan politik dan memperluas jangkauannya untuk meningkatkan atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a). Dukungan anggaran baik melalui APBD, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM.
- b). Koordinasi yang baik antara Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis dengan forum-forum kemitraan, seperti FKUB, FPK, dan FKDM serta Badan Kesbangpol Provinsi Riau.
- c). Adanya Peraturan Bupati yang menguatkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sekaligus sebagai instrumen utama dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil (outcome), efisiensi, dan perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis telah memperoleh **nilai SAKIP kategori “BB” (Sangat Baik)**. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja telah berjalan dengan baik, ditandai dengan perencanaan kinerja yang relatif selaras, pengukuran kinerja yang cukup memadai, serta pelaporan kinerja yang informatif dan akuntabel. Selain itu, sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis, khususnya dalam menjaga stabilitas politik, ketahanan ideologi, dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat.

Namun demikian, dalam perspektif peningkatan kualitas SAKIP menuju kategori yang lebih tinggi (A), masih terdapat beberapa area perbaikan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu:

1. Penguatan keterkaitan (cascading) kinerja, agar hubungan logis antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan semakin jelas dan berbasis pada outcome.
2. Peningkatan kualitas indikator kinerja, terutama dalam memastikan indikator benar-benar mencerminkan hasil (outcome) dan memiliki daya ungkit terhadap sasaran strategis.
3. Optimalisasi pemanfaatan data kinerja, melalui penyediaan data yang valid, real time, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan Keputusan.
4. Pendalaman analisis efisiensi anggaran, sehingga keterkaitan antara penggunaan sumber daya dengan capaian kinerja dapat diukur secara lebih komprehensif.
5. Penguatan tindak lanjut hasil evaluasi, agar hasil monitoring dan evaluasi benar-benar digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

Sebagai tindak lanjut, Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk:

1. Melakukan penyempurnaan cascading kinerja secara menyeluruh hingga level operasional.
2. Menyusun dan mereviu indikator kinerja berbasis outcome dengan pendekatan SMART.
3. Mengembangkan sistem informasi kinerja yang terintegrasi dan berbasis digital.
4. Meningkatkan kualitas analisis kinerja dan anggaran berbasis value for money.
5. Memperkuat peran monitoring dan evaluasi internal sebagai instrumen pengendalian kinerja.
6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam implementasi SAKIP secara berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan implementasi SAKIP di Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis dapat terus meningkat dan mampu mendorong terwujudnya kinerja organisasi yang lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai penegasan akhir, Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk menjadikan LKjIP tidak sekadar sebagai dokumen pelaporan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi, baik internal maupun eksternal, akan ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan guna memastikan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dari kategori **“BB”** menuju **“A”**.

Ke depan, keberhasilan kinerja tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran dan capaian output, tetapi dari sejauh mana program dan kegiatan mampu memberikan manfaat nyata (outcome) serta dampak (impact) bagi masyarakat. Dengan komitmen tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil, serta berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Bengkalis, 26 Januari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis



Drs. H. Suwanto, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19690909 198908 1 001